

ISBN: 978-602-9461-06-0

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Tema:
Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan

IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA (ISPI)
bekerjasama dengan
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

2012



PENGANTAR PROCEEDING

Seminar Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mengambil Tema Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan, didasari kondisi objektif berbagai persoalan pendidikan yang semakin hari semakin kompleks dan menuntut pemecahan dan penyelenggaraan yang sistemik.

Beberapa isu pendidikan yang saling berkait dan strategis terutama menyangkut tenaga pendidik, pembiayaan, sarana dan infrastruktur, sistem evaluasi, dan yang tak kalah penting yang acapkali terlupakan adalah proses pendidikan itu sendiri.

Hal terakhir yang disebutkan menyangkut kompetensi tenaga pendidik yang harus dikembangkan secara berlanjutan mulai dari rekrutmen sampai pensiun. Ini terkait dengan bagaimana guru dididik dan dikembangkan profesionalnya.

Semua hal yang disebutkan perlu diorganisasikan ke dalam sistem manajemen nasional pendidikan yang efektif.

Seminar ini diharapkan dapat mengorganisasikan pemikiran secara utuh yang melahirkan alternatif solusi dalam sebuah Re-Desain.

Jakarta, 20 Januari 2012

Ketua Umum PP ISPI

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

Proseding

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka proseding ini dapat diselesaikan dengan baik. Proseding ini berisi kumpulan makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) tanggal 21-22 Januari 2012 di Yogyakarta..

Seminar nasional ini diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam seminar adalah Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan.

Tema pokok tersebut kemudian dijabarkan ke dalam subtema, yaitu (1) Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2) Redesain Sistem Pendidikan Guru dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (3) Redesain Sistem Kurikulum (SKL, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian), (4) Sistem Pendanaan Pendidikan (5) Sarana dan Prasarana Pendidikan, (6) Evaluasi Sistem Pendidikan.

Tema tersebut bertolak dari isu-isu penting yang muncul dalam dunia pendidikan. Renstra Depdiknas, misalnya, mengemukakan tiga hal yang menjadi pilar pendidikan, yaitu (1) Pemerataan dan perluasan akses, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) Penguatan tata kelola (*governance*), akuntabilitas dan pencitraan publik. Idealnya keseluruhan upaya dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu dilaksanakan dalam konteks NKRI dengan menerapkan konsep desentralisasi pendidikan.

Sementara itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai imperatif yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum, seperti yang menyangkut badan hukum pendidikan, dan gaji guru yang masuk dalam perhitungan 20% biaya pendidikan. Dalam konteks seperti itu muncul pendapat tentang perlunya melakukan redesign terhadap sistem dan desentralisasi pendidikan.

Dalam realitasnya dampak-dampak politis sangat deras merambah dunia pendidikan. Kebijakan dinilai sebagian orang bersifat sporadis, koordinasi kurang efektif, dan terjadi ketakkonsistenan dan ketakkoherenan sistem dan desentralisasi pendidikan. Semua itu berdampak luas terhadap perwujudan sistem pendidikan sebagai bagian integral dari keseluruhan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembicara kunci dalam seminar ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Prof. Dr. Mohammad Nuh. Pembicara-pembicara lain adalah para pakar tingkat nasional bidang pendidikan yang sudah banyak makan garam. Pada umumnya mereka adalah pejabat atau mantan pejabat dalam lembaga kependidikan. Pemikiran dan pengalaman mereka dituangkan dalam bentuk makalah sebagai sumbangsih dalam rangka redesign sistem pendidikan di negara kita.

Akhinya, panitia menyampaikan terima kasih kepada nara sumber yang telah memberikan kontribusinya berupa pemikiran dan pengalaman dalam bentuk makalah. Semoga pemikiran-pemikiran itu dapat dibaca dan direnungkan untuk kemudian digunakan sebagai acuan untuk membuat desain sistem pendidikan yang lebih baik. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

Halaman

1 KATA PENGANTAR KETUA ISPI

2 PENDAHULUAN

3 DAFTAR ISI

I

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Oleh: Prof. Soedijarto, MA

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Oleh: Prof. Dr. Fakry Gafar, M.Ed

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Oleh: Prof. Dr. Agus Dwiyanto

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di Sekolah sebagai Sarana Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan. *Oleh: Mulyono, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*

Optimalisasi Desentralisasi Pendidikan (Model *Integrative RegMap-Regulatory Impact Assesment (IRR)* Pembentukan Perda Pendidikan yang Berbasis Pendidikan Berkarakter Kearifan Nilai Lokal). *Oleh: Rodiyah, UNNES Semarang*

Redesain Pendidikan Kejuruan di Indonesia sebagai suatu Wacana Ke Depan. *Oleh: Badraningsih Lestari, FT UNY*

Redesain Sistem Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Menengah Kejuruan: Alternatif Pengentasan Pengangguran Di Indonesia. *Oleh: Nuryadin Eko Raharjo, FT UNY*

Rekonstruksi Pendidikan dan Penguatan Modal Sosial. *Oleh: Siti Irene Asuti D, FIP UNY*

Isu-Isu Strategis Desentralisasi Pendidikan Kejuruan Indonesia. *Oleh: Dr. Putu Sudira, M.P. FT UNY*

II

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Oleh: Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, Rektor UPI Bandung*

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. *Oleh: Prof. Dr. Muchlas Samani, Rektor UNESA Surabaya*
Redesain Sistem Pendidikan Guru dan Sistem Manajemen Pendidikan. *Oleh: Prof. Dr. Noeng Muhadjir*

Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor. *Oleh: Dr. Muth Farozin, FIP UNY*

Masa Depan Profesi Guru dalam Bingkai Sentralisasi Pendidikan (Kajian terhadap Praktik Pengembangan Profesi Guru di Daerah Pasca berlakunya UU No. 14 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005). *Oleh: Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd, UPI Bandung*

Studi Orientasi Tugas Pengawas dan Kepala Sekolah (Suatu Gagasan Melakukan Revitalisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Kepengawasan Pendidikan di Era Desentralisasi Pendidikan). *Oleh: Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M. Pd Universitas Negeri Gorontalo*

Kontra-Profesional dalam Pengadaan dan Pemberdayaan Guru. *Oleh: Udik Budi Wibowo, FIP UNY*

Memulihkan Kesemrawutan dalam Praktik Pendidikan di Sekolah. *Oleh: Abdullah Pandang, FIP UNM*

Redesign Pendidikan Calon Guru untuk Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusif. *Oleh: Pujaningsih M.Pd, FIP UNY*

Penguatan Fungsi Pengawas Sekolah dalam Kerangka Perbaikan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Oleh: Rahmania Utari, M.Pd, FIP UNY*

Model Hipotetik Jalur Karier Lulusan Program Studi S1 Administrasi/ Manajemen Pendidikan Sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Berbagai Jenis Lembaga Pendidikan. *Oleh: Priadi Surya, M.Pd, FIP UNY*

Redesain Sistem Pendidikan Guru Di LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah. *Oleh: M. Joko Susilo, M.Pd; Nani Aprilia, M.Pd; dan Nur Hidayah, M.Pd, UAD Yogyakarta*

Peran Guru dan Pendidikan Guru Masa Depan. *Oleh: Bambang Setiyo Hari Purwoko, FT UNY*

Guru Profesional Dan Relevansi Pendidikan. *Oleh: Taty Fauzi dan Mardiana*

Penambahan Program Wajib Kokurikuler Sebagai Redesain Sistem Pendidikan Guru. *Oleh: Hermanto, FIP UNY*

Model Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Melalui Pembelajaran Berbasis Kerja (*Work-Based Learning*). *Oleh: Budi Tri Siswanto, FT UNY*

Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC): Model Kurikulum Bernuansa Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. Oleh: Bayu Dwi Nurwicaksono, UNESA Surabaya

Redesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Era Kemanusiaan Universal. Oleh: Anik Ghufron, FIP UNY

Kaji Ulang Standar Kompetensi Lulusan dalam Konteks Redesain Sistem Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia. Oleh: Dr. Mukminan, FIS UNY

Analisis Pelaksanaan Proses Pendidikan di Indonesia. Oleh: Makmuri, FMIPA UNJ Jakarta

Redesain Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar (SK Dan KD) IPA Terpadu SMP/MTs. Oleh: Ayu Rahayu, Ulfana Prisdiansari, Elsa Yulianingsih, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Redesain Kurikulum Pendidikan Kejuruan. Oleh: Prof. Dr. H. Mukhidin, M.Pd. dkk

Pengembangan Kerangka Evaluasi Implementasi Kurikulum Berbasis Standar Dalam Pendidikan Kejuruan. Oleh: Dedy Suryadi, M.Pd. dan Drs. Sukadi, M.Pd.,MT. FPTK UPI Bandung

Analysis Situasi Pendidikan Bahasa Inggris Kejuruan Di SMK. Oleh: Estu Widodo

Redesain Sistem Pembelajaran Pada Sekolah Berstandar Internasional. Oleh: Triwati Rahayu, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Evaluasi Integrasi Soft Skills Dalam Kurikulum Pendidikan Kejuruan: Ukuran Hasil Belajar Sebagai Indikator Keberhasilan Pengembangan Profesional. Oleh: Sri Wening, FT UNY

Pembangunan Karakter dalam Pembelajaran. Oleh: Prof. Dr. Belferik Manullang

Redesain sistem Kurikulum Pembelajaran Bahasa Inggris Calon Guru SD/AUD Berbasis Communicative Competence. Oleh: Dr. Ali Mustadi, M.Pd. FBS UNY

Redesain Kurikulum S₁ Pendidikan IPA Menuju Standards For Secondary Science Teacher Preparation. Oleh: Insih Wilujeng, FMIPA UNY

Urgensi Integrasi Standar Kompetensi Lulusan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Oleh: Anas Arfandi, FT UNM

Rekonstruksi Pembelajaran Berbasis Metode Socratic (Strategi untuk Mengoptimalkan Hasil Belajar Siswa dan Meningkatkan Kemampuan Belajar Guru. *Oleh: Nandang Rusmana*

Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pembelajaran Melalui Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pembelajaran Berbasis Kompetensi-SCL. *Oleh: Dr. R. Mursid, M.Pd. UNIMED Medan*

Teknik Latihan Keterampilan Dasar Konseling Individual (Studi Eksperimen untuk Menguji Efektivitas Teknik *Microcounseling*, *Interpersonal Process Recall* (IPR) dan *Didactic Experiential* (DE) dalam Melatihkan Keterampilan Dasar Konseling Individual terhadap Mahasiswa Jurusan PPB Angkatan 2007). *Oleh: Anne Hafina A, FIP UPI Bandung*

Redesain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Telaah terhadap Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian). *Oleh: Syukri Fathudin Achmad Widodo, FT UNY*

IV

Sistem Pendanaan Pendidikan. *Oleh: Dr. Abbas Gozali, MA*

Sistem Pendanaan Pendidikan. *Oleh: Prof. Dr. Aris Munandar*

Formula Sistem Pendanaan Sekolah yang Berkeadilan. *Oleh: Prof. Muljani A Nurhadi. M.Ed., M.S., Ph.D, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta*

Meningkatkan partisipasi Orang Tua dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang SMP (Studi di kawasan pedesaan di Kota Semarang). *Oleh: Imam Tadjri. FIP UNNES Semarang.*

V

Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Oleh: Prof. Dr. Bedjo Sujanto, Rektor UNJ Jakarta*

Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Oleh: Dr. Gatot Hary Priowiryanto*

Strategi Penyebaran Konten Pendidikan Berbasis *Digital Video Broadcasting via Satellite* untuk Wilayah Tak terjangkau Internet. *Oleh: Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D. FMIPA UNY dan Hafid Setyo Hadi, ST, Manajer IT-Network SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC), Jakarta*

Profil Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bali. *Oleh: Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd. FOK Undhiksa Singaraja Bali*

Stadion Maguwoharjo Sebagai Sarana Prasarana Olahraga, Rekreasi, dan Bisnis Di Kabupaten Sleman. *Oleh: Sulistiyono, FIK UNY*

VI

Evaluasi Sistem Pendidikan. *Oleh: Prof. Furqon, M.Pd., M.A., P.hD*

Sistem Penilaian Hasil Belajar ABK dalam Implementasi Pendidikan Setting Inklusi. *Oleh: Sukinah FIP UNY*

Perkembangan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Analisis The Global Competitiveness Report. *Oleh: Florentinus Nugroho Hardianto, Harapan Bangsa Business School, Bandung*

Uji Kompetensi Seleksi Guru Berbasis Bidang Studi sebagai Instrumen Danda dalam Pengembangan Profesionalitas Guru. *Oleh: Udi Utomo, UNNES Semarang*

Penilaian Kinerja Guru dan Uji Konsistensi Antar Penilai. *Oleh: Faridl Musyadad, Mahasiswa PPs UNY*

Model Butir Bersama pada Ujian Akhir Daerah untuk Memantau Kualitas Pendidikan di Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi. *Oleh: Dr. Heri Retnawati, FMIPA UNY*

Pengembangan Model Asesmen (Evaluasi) Berorientasi Karir Di Sekolah Menengah Kejuruan. *Oleh: Wahid Munawar, UPI Bandung*

Kedudukan bimbingan dan konseling dalam redesain sistem pendidikan guru. *Oleh : Eka Wahyuni, S. Pd., MAAPD,*

Implementasi kompetensi komputer grafis dan surveying pada tugas jalan raya I Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa jpts. *Oleh : Iskandar Muda Purwaamijaya, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung*

Membumikan ayat-ayat manajemen Menuju kemandirian satuan pendidikan. *Oleh : Nur Aedi, Dr, M.PD*

Pengembangan evaluasi lahan menggunakan autodeskmap untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa jpts fptk upi pada teknik penyehatan. *Oleh : Rina Marina Masri*

Rekonstruksi Pendidikan dan Penguatan Modal Sosial

Oleh Siti Irene Astuti D

ireneast@yahoo.com

Hp 08156876626

Abstrak

Desentralisasi pendidikan mengubah struktur kewenangan dalam tatanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pada satuan pendidikan dalam melakukan proses interaksi sosial sebagai dasar bagi semua bentuk kegiatan manusia. Desentralisasi pendidikan juga telah mengubah berbagai peran-peran penting dalam proses pengelolaan pendidikan. Dialektika terjadi dalam proses perubahan kebijakan, proses desentralisasi pendidikan tidaklah berjalan semata-mata secara otomatis tetapi meminta hal-hal yang berbeda dengan cara-cara pengelolaan sebelumnya. Desentralisasi pendidikan memerlukan persiapan yang matang karena akan mengubah sikap partisipatif rakyat dalam pengelolaan pendidikan, tetapi di sisi lain terjadi fenomena melemahnya modal sosial dalam masyarakat.

Rekonstruksi pendidikan dalam kebijakan pendidikan yang desentralistik masih berproses yang membutuhkan dukungan sosial. Modal sosial diperlukan untuk mempercepat tujuan desentralisasi pendidikan. Dengan modal sosial dapat mengubah sumberdaya individu yang dimiliki oleh setiap sekolah atau masyarakat menjadi sumber daya sosial yang mampu menggerakkan dinamika dalam perbaikan kualitas pendidikan. Penguatan modal sosial perlu dilakukan secara komprehensif dalam sekolah dan masyarakat dengan dibangun kesadaran bersama bahwa modal sosial diperlukan dan dapat dikembangkan dengan progresif oleh semua peran yang ada dalam proses pengelolaan pendidikan. Cara yang dilakukan oleh sekolah dalam penguatan modal sosial dengan mengembangkan fungsi pendidikan pada unsur-unsur yang diperlukan oleh modal sosial antara lain adalah -unsur (a) partisipasi dalam jaringan sosial (*participation and social net work*), (b) saling tukar kebaikan (*reciprocity*), (c) norma sosial (*social norm*), (d) nilai-nilai sosial, dan (e) tindakan yang proaktif.

Kata kunci : desentralisasi pendidikan, modal sosial

PENDAHULUAN

Permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedikitnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata. *Faktor pertama*, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini mengartikan lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan dipenuhi, maka mutu pendidikan (*output*)

secara otomatis akan terjadi. Pendekatan ini gagal karena kurang memperhatikan proses pendidikan. *Faktor kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadangkadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. *Faktor ketiga*, peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat dukungan *input* (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, *monitoring*, evaluasi, dan akuntabilitas) (Diknas, 2001:1). Oleh karena itu, permasalahan pendidikan perlu dikaji dalam perspektif sosiologis mengingat bahwa pendidikan tidak semata-mata sebagai "produk" tetapi sebagai "proses" yang menyangkut hasil interaksi sosial antar berbagai elemen-elemen dalam masyarakat.

Hal-hal yang menguatkan bahwa pendidikan adalah sebuah "proses" sebagaimana yang dipaparkan H.A.R. Tilaar bahwa dalam perspektif mikro yang dijadikan pusat perhatian adalah peserta didik dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dalam proses belajar berkaitan dengan tujuan pendidikan, metodologi, dan evaluasi hasil belajar. Semua masalah tersebut termasuk dalam sistem pendidikan di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh sistem internal, yaitu: 1) pembuat kebijakan, 2) manajemen, dan 3) *service*. Selanjutnya, keseluruhan sistem tersebut didukung oleh sistem eksternal, yaitu: 1) budaya, 2) kekuatan politik, dan 3) kondisi ekonomi. Kekuatan pandangan mikro ialah menempatkan peserta didik sebagai obyek utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Titik tolak adalah proses belajar mengajar yang kondusif agar tujuan dan visi pendidikan dapat diwujudkan sebagaimana yang diinginkan. Kelemahan pandangan mikro ialah seakan-akan proses pendidikan peserta didik akan menentukan segala-galanya atas suksesnya sistem pendidikan nasional. Dalam perspektif ini sistem pendidikan sebagai pelaksana dari kekuasaan negara. (Tilaar, 2003:151).

Pendidikan sebagai "proses" dalam analisis makro dapat dipahami dalam perspektif studi kultural. Dalam konteks ini sistem pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Dalam kaitan antar negara, pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Kekuatan dari perspektif ini adalah sistem pendidikan dapat mengubah gaya hidup suatu masyarakat

karena dapat mengubah tingkah laku seseorang dalam berpikir yang lebih terbuka dan reflektif. Pedagogik kritis merupakan pelopor dari pandangan yang menggunakan pandangan studi kultural. Peran negara dalam perspektif ini dapat bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan mempunyai kontrol terhadap kekuasaan negara (Tilaar, 2003:151)

Perubahan kebijakan sentralistik dan desentralistik sebagai proses yang tak terelakkan, karena kegagalan dalam sentralisasi pendidikan yang dinilai kurang memberikan wacana bagi pengembangan dimensi demokrasi sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh John Dewey dalam *School and Society*, yang menekankan pada inti pendidikan merupakan arena tumbuh dan berkembangnya gaya hidup demokrasi. Artinya, penyelenggaraan, manajemen, proses belajar-mengajar semuanya didasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi. Hal inilah yang meminta persiapan-persiapan yang matang dan kerja keras.

Dalam konteks pemikiran Dewey, gagasan akan perubahan kebijakan sentralistik ke desentralistik menggambarkan bahwa perubahan dari suatu sistem yang sentralistik dan otoriter menjadi suatu sistem demokratis yang terbuka tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, sumber daya manusia yang memadai, organisasi yang demokratis, dan manajemen yang terbuka. Dalam masyarakat demokrasi, pendidikan adalah milik rakyat, dari, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, pendidikan bukanlah semata-mata milik pemerintah (pusat), tetapi merupakan milik rakyat yang mempunyai pendidikan tersebut. Pada akhirnya, pendidikan merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan sikap demokratis, kesatuan bangsa atau nasionalisme, rasa persatuan yang merupakan kapital sosial dari suatu masyarakat. Artinya, pembangunan suatu masyarakat hanya terjadi apabila masyarakat mempunyai kapital sosial yang besar dan bukan sekedar mempunyai dana yang cukup atau lembaga-lembaga yang teratur dengan manajemennya yang terbuka. Semakin besar kapital sosial suatu masyarakat dalam menanggulangi kehidupan bersama, maka akan mempermudah upaya peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut (Jenniefer dalam Tilaar, 200:1501-151).

Perubahan kebijakan pendidikan desentralistik sarat dengan harapan perbaikan pembangunan pendidikan. Sentralisasi pendidikan belum berhasil dalam mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa ini, bahkan slogan *knowledge is power* masih jauh dari realitas. Di samping itu, slogan dunia tentang hak pendidikan bahwa *education for all* masih ada dalam tatanan konsep. Pendekatan sentralistik cenderung mematikan asas demokrasi (Tilaar,1998). Lebih jauh lagi, sentralisasi pendidikan melemahkan partisipasi masyarakat dan menyempitkan ruang gerak bagi masyarakat

karena dapat mengubah tingkah laku seseorang dalam berpikir yang lebih terbuka dan reflektif. Pedagogik kritis merupakan pelopor dari pandangan yang menggunakan pandangan studi kultural. Peran negara dalam perspektif ini dapat bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan mempunyai kontrol terhadap kekuasaan negara (Tilaar, 2003:151)

Perubahan kebijakan sentralistik dan desentralistik sebagai proses yang tak terelakkan, karena kegagalan dalam sentralisasi pendidikan yang dinilai kurang memberikan wacana bagi pengembangan dimensi demokrasi sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh John Dewey dalam *School and Society*, yang menekankan pada inti pendidikan merupakan arena tumbuh dan berkembangnya gaya hidup demokrasi. Artinya, penyelenggaraan, manajemen, proses belajar-mengajar semuanya didasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi. Hal inilah yang meminta persiapan-persiapan yang matang dan kerja keras.

Dalam konteks pemikiran Dewey, gagasan akan perubahan kebijakan sentralistik ke desentralistik menggambarkan bahwa perubahan dari suatu sistem yang sentralistik dan otoriter menjadi suatu sistem demokratis yang terbuka tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, sumber daya manusia yang memadai, organisasi yang demokratis, dan manajemen yang terbuka. Dalam masyarakat demokrasi, pendidikan adalah milik rakyat, dari, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, pendidikan bukanlah semata-mata milik pemerintah (pusat), tetapi merupakan milik rakyat yang mempunyai pendidikan tersebut. Pada akhirnya, pendidikan merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan sikap demokratis, kesatuan bangsa atau nasionalisme, rasa persatuan yang merupakan kapital sosial dari suatu masyarakat. Artinya, pembangunan suatu masyarakat hanya terjadi apabila masyarakat mempunyai kapital sosial yang besar dan bukan sekedar mempunyai dana yang cukup atau lembaga-lembaga yang teratur dengan manajemennya yang terbuka. Semakin besar kapital sosial suatu masyarakat dalam menanggulangi kehidupan bersama, maka akan mempermudah upaya peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut (Jenniefer dalam Tilaar, 200:1501-151).

Perubahan kebijakan pendidikan desentralistik sarat dengan harapan perbaikan pembangunan pendidikan. Sentralisasi pendidikan belum berhasil dalam mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa ini, bahkan slogan *knowledge is power* masih jauh dari realitas. Di samping itu, slogan dunia tentang hak pendidikan bahwa *education for all* masih ada dalam tatanan konsep. Pendekatan sentralistik cenderung mematikan asas demokrasi (Tilaar,1998). Lebih jauh lagi, sentralisasi pendidikan melemahkan partisipasi masyarakat dan menyempitkan ruang gerak bagi masyarakat

pendidik. Proses seperti ini telah menghilangkan potensi masyarakat untuk melahirkan massa yang kritis terhadap situasi pendidikan. Sebagai akibatnya, lembaga pendidikan kurang berperan sebagai ruang publik, bagi tumbuhnya demokrasi. Dampak yang lebih mendalam dari hegemoni pendidikan adalah terjadinya pengikisan pendidikan lokal dan pengikisan budaya-budaya lokal. Tak heran jika kemudian, masyarakat lokal mengalami anomie, alienasi, dan kehilangan identitasnya, serta kehilangan kebhinekaannya (Makmuri,2003:5). Fenomena tersebut menjadi satu indikasi melemahnya modal sosial.

“ Kegagalan pendidikan sentralistik diwarnai oleh kebijakan politik daripada kebijakan akademik. Pendidikan yang sentralistik menjadikan kinerja pendidikan cenderung memperlakukan peserta didik dan guru sebagai robot, *inhuman*, dan *impersonal*. Sebagai hasil akhirnya, beberapa lulusan tidak kreatif dan lemah kemandiriannya setelah terjun di masyarakat dan di dunia kerja. Di samping itu praktek manajemen Sisdiknas membuat kuatnya jiwa birokrasi penyelenggara pendidikan yang dirasakan mulai dari pusat hingga ke tingkat mikro, yakni proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pada tingkat makro kinerja sekolah cenderung korporatis, di mana standar guru, kurikulum, fasilitas, dan prosedur proses pembelajaran ditentukan oleh kantor pusat (Danim, Sudarmawan. 2003:14)”

Modal sosial dibutuhkan dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebagaimana dijelaskan yang oleh Ackerman dan Alscott pentingnya *the stakeholder society* yang diformulasikan secara sederhana, yakni sebagai masyarakat yang para anggotanya mempunyai kepentingan bersama untuk membangun masyarakatnya sendiri. Terdapat lima pemain dalam *the stakeholder society*, yaitu: 1) masyarakat lokal; 2) orangtua; 3) peserta didik; 4) negara; 5) pengelola profesional pendidikan (Dwiyanto, 2003). Dinamika kerja dari *stakeholder* adalah bagian dari modal sosial yang akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program. Realitas sosial menunjukkan kecenderungan bahwa dunia pendidikan yang memiliki modal sosial belum dikembangkan secara optimal bagi perbaikan kualitas pendidikan. Bahkan ada kecenderungan bahwa modal sosial justru semakin melemah, tidak dianggap penting oleh orangtua dan para pengelola pendidik. Fenomena ini membuktikan bahwa ada paradok yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat pendidik tentang peran modal sosial, sebagai modal penting bagi perbaikan mutu pendidikan dan di pihak lain tidak dinilai sebagai modal penting bagi perbaikan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, fungsi negara bukan lagi sebagai penguasa juga bukan sebagai pemegang kekuasaan tunggal yang bertujuan melestarikan kekuasaan negara, tetapi sebagai *partner* yang memfasilitasi proses pendidikan yang disepakati bersama. Tugas negara antara lain membantu adanya standar nasional bahkan internasional dari lembaga-lembaga pendidikan dan membantu daerah-daerah lain yang kekurangan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan.

Untuk membangun wacana pemikiran makalah ini mencoba untuk mendiskusikan tentang bagaimana peran modal sosial dalam mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, khususnya penguatan modal sosial pada tingkat satuan pendidikan ?

PEMBAHASAN

Konsep Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi bukanlah konsep yang mudah untuk didefinisikan, karena konsep ini memiliki berbagai bentuk dan dimensi. Rondineli (1986) sebagaimana dikutip Teguh Yuwono mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen, dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agenya kepada unit kementerian pusat, unit yang berada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba. Sementara itu, Shahid Javed Burki, sebagaimana dikutip Teguh Yuwono, menggunakan istilah desentralisasi untuk menunjukkan adanya proses perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit pemerintah subnasional. (Teguh Yuwono, 2003:27-28)

Dukungan utama perlunya desentralisasi berasal dari teori politik demokrasi liberal klasik, seperti John Stuart Mill bahwa keuntungan secara nasional dan daerah akan semakin meningkat dengan devolusi dan partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Smith, Turner dan Hulme, dikutip oleh Teguh Yowono (37-38) , meliputi: pendidikan politik, *training* kepemimpinan politik, stabilitas politik, ekualitas politik, akuntabilitas, respon pemerintah. Sementara Turner menjelaskan lebih detail tentang manfaat desentralisasi:

1. Perencanaan khusus secara lokal akan mudah dilakukan dengan menggunakan informasi terkini dan detail yang hanya di tingkat lokal (*locally spesific plans*);
2. Koordinasi antara organisasi dapat dilakukan pada level daerah (*inter-organizational coordination*);
3. Eksperimentasi dan inovasi yang didorong oleh desentralisasi akan meningkatkan peluang strategi pembangunan lebih efektif (*experimentation and innovation*);
4. Motivasi personal di daerah akan meningkat seiring dengan tanggungjawab yang akan dimiliki untuk mengembangkan program yang akan dikelola (*motivation of field-level personnel*);
5. Pengurangan beban pekerjaan pada agen atau kantor cabang pemerintah pusat di daerah akan melepaskan mereka dari rutinitas pengambilan keputusan dan memberi mereka waktu yang lebih untuk menentukan isu-isu strategis sehingga akan memperbaiki kualitas kebijakan (*workload reduction*)

Berbagai alasan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Alasan tersebut antara lain dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk kepentingan daerah maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Dari segi manajemen, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Dari segi kultural, desentralisasi dimaksudkan untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan. Segi pembangunan desentralisasi dapat melancarkan formulasi dan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari kepentingan pusat, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya.(Dwiyanto, 2005:49-50) . Berdasarkan alasan-alasan tersebut, desentralisasi diperlukan untuk mengefektifkan kebijakan yang luas dari berbagai kehidupan masyarakat.

Desentralisasi pendidikan diterapkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Tim Bank Dunia bahwa desentralisasi pendidikan menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, peningkatan efisiensi, dan efektivitas usaha pendidikan; pembagian kekuasaan politik; peningkatan kualitas pendidikan; dan peningkatan inovasi dalam pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dampak positif atas kebijakan desentralisasi pendidikan, diharapkan terjadi : a) peningkatan mutu, b) efisien keuangan, c) efisien administrasi, dan d) perluasan/pemerataan. (Alhuman Amich 2000).Meskipun demikian, desentralisasi pendidikan tidak sendirinya meningkatkan mutu pendidikan dalam arti peningkatan mutu belajar-mengajar

Desentralisasi pendidikan diharapkan memperkuat pemerintah daerah dalam membangun modal sosial. Karena penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa wewenang paling besar untuk sektor pendidikan sejak pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan menengah atas adalah urusan pemerintah kabupaten atau kota. Undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan munculnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban bagi orangtua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2). Selanjutnya, kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). Demikian juga, tentang pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam konteks inilah pendidikan di daerah benar-benar memberikan dasar yang

cukup bagi daerah untuk lebih diberdayakan dalam arti lebih fungsional, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan tidak hanya sekedar menjadi retorika . Oleh karena itu, komitmen bupati atau walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota terhadap bidang pendidikan akan memberi warna dan corak pendidikan di daerahnya.

Kebijakan desentralisasi pendidikan membawa konsekuensi besar perubahan pendidikan di Indonesia. Sejumlah kaidah, ketentuan, peraturan, dan aneka panduan menunjukkan bahwa berbagai unit antara pusat dan sekolah tak hanya sebagai perantara, penyampai (transmisi) tetapi perlu menjabarkan membuat kebijakan operasional dan membuat kebijakan sekolah. Dalam kaitannya dengan perubahan ini, unit-unit di kabupaten dan kota perlu mengembangkan kapasitas dalam merumuskan kebijakan operasional maupun kebijakan yang menjadi wewenangnya. Di banyak kasus, kebijakan semacam ini tidak eksplisit, dirumuskan secara jelas. Sebagai akibatnya desentralisasi pendidikan belum dapat menghasilkan bahwa (Soeyanto,2001):

1. Setiap unit dan personil semakin menyadari dan memahami proses kebijakan yang menjadi urusannya.
2. Pendidikan dasar dapat memainkan peranan sentral dalam melaksanakan desentralisasi kehidupan masyarakat.
3. Pentingnya kemitraan, dialog, dan membangun belajar organisasi dalam mencapai tujuan pendidikan dasar.
4. Pentingnya menyusun panduan dan pengembangan kapasitas unit-unit dan personil di jajaran pendidikan kabupaten dan kota.
5. Pentingnya mengenali *stakeholder* pendidikan dan sedia serta mampu melibatkan mereka dalam kegiatan dan manajemen pendidikan.
6. Perlunya meningkatkan kesadaran pentingnya membangun masyarakat belajar dengan kemampuan dialog secara akt

Kegagalan kebijakan pendidikan desentralistik dapat diantisipasi dengan pemahaman terhadap berbagai sumber masalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Chapman dan Mahlek bahwa kegagalan kebijakan pendidikan dari pusat yang gagal masuk dan dilaksanakan di sekolah-sekolah karena berbagai faktor yang menjadi sumber masalahnya, antara lain:

1. Kebijakan pusat tak dikomunikasikan ke sekolah; para kepala sekolah dan guru tak mengerti bahwa mereka harus mengerjakan hal yang berbeda dengan sebelumnya.
2. Kebijakan yang telah dikomunikasikan ke sekolah tetapi dalam ungkapan-ungkapan yang tak jelas sehingga tak tahu apa yang harus mereka lakukan.
3. Tak jarang kepala sekolah dan guru beranggapan bahwa kebijakan dan program-program itu tak cocok dengan realitas sekolah dan kelas.
4. Para guru dan personal tak siap mengerjakan kebijakan dan prakteknya.

5. Cara-cara dan dukungan untuk menerapkan kebijakan tak mencukupi.
6. Informasi sekolah yang tersedia di departemen tak mencantumkan informasi praktek pedagogis di tingkat kelas.
7. Seringkali terjadi interaksi praktek yang positif dan negatif

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, bahwa kegagalan kebijakan pendidikan disebabkan kurang menekankan pada analisis proses. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebijakan bukan lagi bersifat linear, tetapi dilihat sebagai proses yang dinamik dan interaktif, diartikan bahwa di setiap langkah, kegiatan proses dapat kembali ke langkah-langkah sebelumnya, proses mengkaji ulang sebuah kebijakan dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dialektika terjadi dalam proses perubahan kebijakan. Dalam hal ini, proses desentralisasi dan otonomi pendidikan tidaklah berjalan semata-mata secara otomatis tetapi meminta hal-hal yang berbeda dengan cara-cara pengelolaan sebelumnya. Desentralisasi pendidikan memerlukan persiapan yang matang karena akan mengubah sikap rakyat dalam pengelolaan pendidikan. Di sisi lain, kegagalan tersebut juga disebabkan melemahnya modal sosial dalam masyarakat.

Rekonstruksi pendidikan dalam rangka otonomi diperlukan agar perubahan kebijakan berhasil secara optimal, sebagaimana dijelaskan oleh Sidi meliputi (Mulyasa, 2006:6-7):

1. Upaya untuk peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan memantapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi mungkin akan berbeda antar sekolah, antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal normal dan unggulan.
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orangtua pada level pengambilan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru, senior, wakil orangtua, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi perencanaan, implementasi, *monitoring*, serta evaluasi program kerja sekolah.
4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas bahwa salah satu aspek penting yang diperlukan dalam proses rekonstruksi pendidikan yakni penguatan kembali peran modal sosial bagi

keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan yang desentralistik, karena sampai saat ini desentralisasi pendidikan belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi perbaikan mutu pendidikan.

Konsep Modal Sosial Dalam Kebijakan Pendidikan

Secara akademik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan “modal sosial”? Istilah “modal sosial” sebenarnya sudah lama dikenalkan oleh sosiolog kenamaan Emile Durkheim pada abad ke-19. Durkheim menyebut istilah “modal sosial” untuk menyatakan ikatan sosial antarmanusia di dalam sebuah masyarakat sangat penting untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan bermasyarakat. Ia merupakan sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan hidup bersama yang tidak mungkin dicapai secara personal. Sebagai contoh, misalnya, kegiatan pendidikan. Pendidikan merupakan aktivitas kolektif antara pendidik, siswa, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai sebuah aktivitas kolektif, pendidikan memerlukan kerjasama banyak pihak, mulai dari pemimpin sekolah, para guru, tenaga administrasi, murid, orangtua siswa, komite sekolah, dan tentu pemerintah. Jika semuanya fungsional sesuai tugas dan peran masing-masing, maka pendidikan akan berjalan baik dengan hasil yang baik pula. Ketika mengenalkan istilah “modal sosial” (Mudjia Rahardjo, 2010)

Emile Durkheim membayangkan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis hanya bisa dicapai manakala antarwarga masyarakat itu saling berhubungan dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di masyarakat itu dengan lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan yang ada. Nilai-nilai itu terus dijaga sebagai kekuatan yang mengikat, sehingga menjadi kekuatan tersendiri yang bermanfaat tidak saja untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, tetapi juga untuk menangkis berbagai upaya yang mengancam kohesivitas mereka. Apa yang dimaksudkan sebagai masyarakat oleh Durkheim tentu masyarakat dalam arti luas, termasuk masyarakat pendidikan. Emile Durkheim sadar sepenuhnya bahwa di setiap masyarakat selalu ada perbedaan di antara anggotanya, tetapi pada saat yang sama juga ada kesamaannya. Dalam konteks modal sosial ini, kesamaan lebih ditonjolkan daripada perbedaan. Ini tidak mudah, karena itu, diperlukan upaya penyadaran dari tokoh atau pemimpin masyarakat bahwa tatkala masyarakat ingin mencapai tujuan bersama maka ego dan kepentingan pribadi selayaknya ditanggalkan dulu. Masyarakat harus disadarkan bahwa ada tujuan bersama yang hanya bisa dilakukan jika warga merasa dalam sebuah ikatan kuat untuk menjalankan peran secara bersama-sama. Ada “*others*” dan “*otherness*” yang bisa diperankan kelebihan-kelebihannya dan selanjutnya dihargai (Mudjia Rahardjo: 2010).

Dasar pemikiran Emile Durkheim tersebut yang membuktikan bahwa secara sosiologis bahwa konsep modal sosial telah melekat dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangannya konsep modal sosial terus menjadi kajian yang terus didiskusikan dari James Coleman, didiskusikan lebih lanjut oleh Pierre Bourdieu dan dipopulerkan Robert Putnam dan beberapa pemikir lainnya. Persoalan yang akan dipaparkan dalam makalah ini lebih menekankan pada pemahaman tentang konsep dasar modal sosial dan bagaimana penguatan yang dapat dilakukan oleh sekolah jika modal sosial dinilai sebagai modal penting bagi perbaikan kualitas pendidikan.

Konsep modal sosial dikembangkan oleh James Coleman, didiskusikan lebih lanjut Pierre Bourdieu dan dipopulerkan Robert Putnam. Menurut James Coleman (1990), atas hasil studinya tentang pemuda dan pendidikan (*youth and schooling*) mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya (Hauberer, 2011:249).

Pierre Bourdieu menekankan pada aspek yang berbeda bahwa modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan bermanfaat: modal harga diri dan kehormatan seringkali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya karier politik. Modal sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbali balik perkenalan dan pengakuan yang seikit banyak terinstitusionalisasikan. Erat dan tahannya ikatan sama vitalnya: Modal sosial mempresentasikan 'agregat sumber daya yang potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama'. Nilai ikatan yang dijalin seseorang individu tergantung pada jumlah koneksi yang dapat dimobilisasi dan volume modal yang dimiliki oleh masing-masing koneksi. Ikatan antara koneksi sosial dan modal budaya atau modal finansial dengan mencontohkan profesi, seperti pengacara dan dokter yang memanfaatkan "koneksi sosial". Koneksi sosial memerlukan kerja. (dalam John Field, 2010:23). Coleman dan Bourdieu memiliki kesamaan dalam fokus kajian yaitu individual, terutama yang berkaitan dengan peran dan hubungan dengan sesama sebagai unit analisis modal sosial (Hauberer, 2011:250).

Dalam bukunya "Toward a Methodological Foundation" beberapa point yang ditulis oleh Julia Hauberer menjelaskan bahwa konsep dasar modal sosial Bourdieu (1983) dan Coleman (1988) menjelaskan definisi umum dari modal sosial. Modal sosial adalah properti hubungan antara individu-individu yang merupakan aktor sumber daya yang dapat menggunakan dan manfaat dari hubungan sosial tersebut. Modal sosial diproduksi dalam struktur terbuka dan tertutup serta hubungan lembaga dan non lembaga adalah sama. Coleman melihatnya sebagai suatu aspek dari struktur sosial. Dia membedakan jenis kepercayaan modal sosial dan hubungan kewenangan, norma dan sanksi yang efektif, informasi organisasi sosial potensial dan sepadan. Putnam (2000) berkaitan dengan penguatan demokrasi dan output ekonomi masyarakat melalui jaringan sipil yang memfasilitasi penciptaan kepercayaan dan norma timbal balik (Hauberer, 2011:250).

Modal sosial muncul dalam struktur hubungan atau jaringan antar individu atau kolektif. Ini menyediakan akses ke sumber daya sosial. Beberapa sumber daya yang lebih berguna untuk memfasilitasi tindakan ekspresif dan yang lain lebih berguna untuk memfasilitasi tindakan instrumental. Struktur atau jaringan dapat terbuka (*bridging*) atau tertutup (ikatan). Yang pertama lebih bermanfaat untuk tindakan instrumental dan tindakan dengan karakter kompetitif dan yang terakhir lebih berguna untuk tindakan ekspresif dan tindakan dengan karakter koperasi. Struktur bervariasi lanjut terkait dengan ukuran dan jangkauan / keragaman mana ukuran kecil dan berkisar lebih mungkin untuk menyediakan akses ke sumber daya untuk tindakan ekspresif dan ukuran besar dan rentang yang lebih mungkin untuk memberikan akses ke sumber daya untuk tindakan instrumental (Hauberer, 2011:251).

Francis Fukuyama (2003) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan, dan terutama bagi kestabilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan meraskan kemajuan dan akan mampu, secara efisien dan efektif, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat. Prasyarat modal sosial adalah aspek sosial budaya seperti norma-norma timbal balik dan kepercayaan umum dan aset kolektif (misalnya ekonomi, teknologi dan latar belakang sejarah) serta karakteristik individu dari responden tertentu

Dalam bukunya "Toward a Methodological Foundation" beberapa point yang ditulis oleh Julia Haubrer menjelaskan bahwa konsep dasar modal sosial Bourdieu (1983) dan Coleman (1988) menjelaskan definisi umum dari modal sosial. Modal sosial adalah properti hubungan antara individu-individu yang merupakan aktor sumber daya yang dapat menggunakan dan manfaat dari hubungan sosial tersebut. Modal sosial diproduksi dalam struktur terbuka dan tertutup serta hubungan lembaga dan non lembaga adalah sama. Coleman melihatnya sebagai suatu aspek dari struktur sosial. Dia membedakan jenis kepercayaan modal sosial dan hubungan kewenangan, norma dan sanksi yang efektif, informasi organisasi sosial potensial dan sepadan. Putnam (2000) berkaitan dengan penguatan demokrasi dan output ekonomi masyarakat melalui jaringan sipil yang memfasilitasi penciptaan kepercayaan dan norma timbal balik (Hauberer, 2011:250).

Modal sosial muncul dalam struktur hubungan atau jaringan antar individu atau kolektif. Ini menyediakan akses ke sumber daya sosial. Beberapa sumber daya yang lebih berguna untuk memfasilitasi tindakan ekspresif dan yang lain lebih berguna untuk memfasilitasi tindakan instrumental. Struktur atau jaringan dapat terbuka (*bridging*) atau tertutup (ikatan). Yang pertama lebih bermanfaat untuk tindakan instrumental dan tindakan dengan karakter kompetitif dan yang terakhir lebih berguna untuk tindakan ekspresif dan tindakan dengan karakter koperasi. Struktur bervariasi lanjut terkait dengan ukuran dan jangkauan / keragaman mana ukuran kecil dan berkisar lebih mungkin untuk menyediakan akses ke sumber daya untuk tindakan ekspresif dan ukuran besar dan rentang yang lebih mungkin untuk memberikan akses ke sumber daya untuk tindakan instrumental (Hauberer, 2011:251).

Francis Fukuyama (2003) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan, dan terutama bagi kestabilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan meraskan kemajuan dan akan mampu, secara efisien dan efektif, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat. Prasyarat modal sosial adalah aspek sosial budaya seperti norma-norma timbal balik dan kepercayaan umum dan aset kolektif (misalnya ekonomi, teknologi dan latar belakang sejarah) serta karakteristik individu dari responden tertentu

(misalnya jenis kelamin, etnis). Selain itu, aspek sosial budaya merupakan produk dari modal sosial.

Modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Dalam proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh modal sosial antara lain sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai, dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peran penting adalah kemauan masyarakat atau kelompok tersebut untuk secara terus menerus proaktif, baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan-jaringan kerjasa, maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru.

Modal sosial berisi sumber daya (misalnya, kekayaan kekuasaan, dan reputasi, serta jaringan sosial) aktor individu lain dengan siapa aktor individu dapat mendapatkan akses melalui hubungan sosial yang langsung atau tidak langsung. Mereka adalah sumber daya tertanam dalam hubungan jaringan seseorang. Seperti sumber daya pribadi, sumber daya sosial dapat meliputi barang-barang material seperti tanah, rumah, mobil uang, dan dan barang-barang simbolik seperti pendidikan, keanggotaan di klub, gelar kehormatan, bangsawan atau judul organisasi, nama keluarga, reputasi, atau popularitas (Nan Lin, 2004: 41-55), Dalam konteks di sekolah, maka setiap siswa pada dasarnya memiliki sumber daya pribadi yang berbeda karena latarbelakang sosial-budaya, tetapi di sisi lain kemampuan untuk membangun koneksi sosial secara langsung maupun tidak langsung dapat memperkuat sumber daya pribadi yang sudah dimiliki sebelum. Sekolah mempunyai peran penting dalam memperkuat modal sosial yang melekat pada setiap siswa.

Modal sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumberdaya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal Sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu Modal Manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada

modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Selain unsur pembentuk utama tersebut juga ada unsur pembentuk lain dari modal sosial yang juga tidak kalah penting peranannya. Unsur-unsur ini dapat dikatakan sebagai syarat kecukupan (*sufficiency condition*) dari terbentuk atau terbangunnya kekuatan modal sosial di suatu masyarakat. Adapun unsur-unsur yang dimaksudkan adalah (Hasbullah, 2006): (a) partisipasi dalam jaringan sosial (*participation and social net work*), (b) saling tukar kebaikan (*reciprocity*), (c) norma sosial (*social norm*), (d) nilai-nilai sosial, dan (e) tindakan yang proaktif.

Sekolah dengan kekuatan modal sosialnya dapat berperan dan bergerak sebagai media bagi siswa untuk termotivasi dalam mengembangkan sumber daya pribadinya lebih optimal, ketika siswa memiliki kemampuan dalam berinteraksi dalam jaringan yang lebih kuat sehingga secara hirarkhis mampu bergerak pada strata yang lebih tinggi. Namun demikian, sekolah sebagai tempat belajar siswa justru melemahkan sumber daya pribadi sehingga siswa merasa inferior dalam menilai kapasitas dirinya terhadap kebutuhan sosial yang lebih tinggi.

Kesadaran sekolah untuk mengembangkan organisasi sosial melalui berbagai kegiatan sebagai cara mempertahankan eksistensinya. Hal ini akan semakin kuat jika siswa dan guru sebagai aktor dapat mengembangkan potensi sumber pribadi secara optimal. Optimalisasi dalam pengembangan potensi diri seluruh komponen sekolah sebagai aktor individu secara akumulatif akan menjadi kekuatan modal sosial dalam memperbaiki dan mengembangkan mutu sekolah.

Penguatan Modal Sosial Sekolah

Sekolah perlu untuk membangun motivasi yang kuat pada dimensi perbedaan individual siswa dengan melakukan asosiasi yang lebih menghargai perbedaan individu dengan membangun kohesivitas sosial yang dibangun atas kerjasama dan kepercayaan yang kuat untuk berbagi antar siswa dalam menjaga perbaikan tujuan bersama. Modal sosial yang mendasari bagi perbaikan kualitas sekolah bergerak dari proses interaksi sosial yang mengembangkan aktivitas belajar yang mampu memotivasi semua dasar kebutuhan keilmuan siswa sesuai dengan kebutuhannya, dengan mengembangkan asosiasi yang kuat untuk menyatukan semangat kebersamaan dalam memperbaiki prestasi belajar sebagai bagian untuk

dapat dijadikan siswa sebagai media untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Penguatan modal sosial dapat dilakukan oleh semua komponen warga sekolah yang memiliki kesepakatan bersama bahwa modal sosial adalah aspek yang sangat penting dan dibutuhkan untuk perbaikan mutu pendidikan. Kesepakatan yang dibangun didasarkan pada kesadaran bersama bahwa fungsi modal sosial a) sebagai sumber kontrol sosial, b) sebagai sumber dukungan keluarga dan c) sebagai sumber keuntungan melalui jaringan ekstra-keluarga (Portes, 1998). Apa yang disampaikan oleh Portes membuktikan bahwa bagi sekolah modal sosial sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang dapat membangun budaya sekolah yang efektif bagi pengembangan sumber daya pribadi siswa. Dalam hal inilah sekolah memiliki peran penting dalam pengembangan pribadi dan sosial siswa serta kognitif intelektual. Program sekolah yang didesain atas dasar kurikulum tertentu, program ekstrakurikuler membutuhkan modal sosial dalam prosesnya, karena siswa pada umumnya belum memahami efek dari proses belajar maupun keberadaan dalam sebuah komunitas atau group akan berdampak pada kemampuan siswa dalam membangun suatu hubungan dan jaringan sosial di kemudian hari.

Dari segi lain, modal sosial diperlukan dalam perkembangan emosional siswa, khususnya untuk membangun rasa memiliki, kesejahteraan, rasa percaya diri. Persoalan yang dialami oleh sekolah adalah untuk mengatasi kecenderungan eksklusivisme yang dinilai melemahkan kekuatan modal sosial. Hal lain yang dihadapi oleh sekolah dalam membangun modal sosial adalah keputusan pihak sekolah yang memberikan sanksi pada siswa yang terlambat ke sekolah, absen dan kurang dapat mengikuti aktivitas belajar secara normal karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menjadi hubungan sosial dalam berbagai kesempatan.

Bagi sekolah penguatan modal sosial dapat dilakukan berdasarkan langkah penting yang dimulai dari penguatan unsur-unsur modal sosial yang dimiliki oleh sekolah, *pertama* lebih berpartisipasi dalam berbagai jaringan sosial yang menguatkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa sebagai sumber daya pribadi yang mampu untuk berbagi dalam komunitas sekolah maupun masyarakat (*participation and social net work*), *kedua*, mengkondisikan interaksi yang *heterophilious* untuk saling tukar kebaikan agar siswa dapat mengembangkan sumber daya sosial (*resiprocity*), *ketiga*, membangun budaya sekolah untuk mempertahankan ketertiban

dan disiplin sosial (*social norm*), keempat, menanamkan kepercayaan dan rasa percaya diri dan tanggung jawab serta kerjasama sebagai modal penting untuk memperkuat modal sosial, kelima, mengembangkan kemampuan pada semua stakeholder untuk melakukan tindakan yang proaktif dalam merespon perubahan yang terus terjadi.

KESIMPULAN

Perubahan paradigma sentralistik ke desentralistik membutuhkan transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Saat ini partisipasi sebagai aset penting bagi pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan secara optimal karena melemahnya fungsi modal sosial. Artinya, kebijakan desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan dan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan cenderung gagal jika tidak didukung oleh kekuatan modal sosial.

Penguatan modal sosial dapat dilakukan oleh semua komponen warga sekolah yang memiliki kesepakatan bersama bahwa modal sosial adalah aspek yang sangat penting dan dibutuhkan untuk perbaikan mutu pendidikan. Bagi sekolah modal sosial sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang dapat membangun budaya sekolah yang efektif bagi pengembangan sumber daya pribadi siswa. Bagi sekolah penguatan modal sosial dapat dilakukan berdasarkan langkah penting yang dimulai dari penguatan unsur-unsur modal sosial yang dimiliki oleh sekolah dengan lebih berpartisipasi dalam berbagai jaringan sosial yang menguatkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa sebagai sumber daya pribadi yang mampu untuk berbagi dalam komunitas sekolah maupun masyarakat dan mengkondisikan interaksi yang *heterophilious* untuk saling tukar kebaikan agar siswa dapat mengembangkan sumber daya sosial; membangun budaya sekolah untuk mempertahankan ketertiban dan disiplin sosial; menanamkan kepercayaan dan rasa percaya diri dan tanggung jawab serta kerjasama sebagai modal penting untuk memperkuat modal sosial serta mengembangkan kemampuan pada semua stakeholder untuk melakukan tindakan yang proaktif dalam merespon perubahan yang terus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhuman, Amich. "Pembangunan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi". *Kompas*, 11 September 2000.
- Hauberer, Julia (2011), *Social capital Theory*, VS Reseach.

- Baron, Setephen dkk (2000), *Social Capital ; Critical Perspective* , New York: Oxford University.
- Danim, Sudarmawan. (2003). *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan I*. Yogyakarta: Pustaka Jaya
- Depdikdasmen. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. *Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Lin, Nan (2004), *Social Capital*, Australia : Cambrigde University.
- Makmuri, dkk. (2003). *Demokratisasi Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI
- Mulyasa. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA
- Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Pelaksanaan*, Diknas, 2001
- Rahardjo, Mudjia (2010), *Mengenal Modal Sosial*, Friday, 14 May 2010 07:21 <http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/204-mengenal-modal-sosial>.
- Rasiyo. 2005. *Kebijakan Desentralisasi Manajemen Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah*. Surabaya: Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945.
- Suyanto, Bagong. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Gentengkali*, Vol. 6 tahun 2004, hal. 11-13.
- Suyanto, Bagong. 2005. Pendidikan Berbasis Masyarakat: Prasyarat Yang Dibutuhkan.. *Edukasi*, Vol. 1/No. 1, hal. 9-10.
- Suyata. 2004. *Decentralized Basic Education Project, District Capacity Building*. Departemen Pendidikan Nasional Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Schuller, Tom dkk (2004). *The benefits of Learning : The impact of education on health, family life and soscial capital*, London : Routledge Falmer.
- Teguh Yuwono (2003). *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: Clogapps Diponegoro University
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Pendidikan Nasional*. Magelang: Tera Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Sertifikat

Nomor: 022/SEMNAS-ISPI/1/2012

Diberikan Kepada
Dr. Siti Irene Astuti D.

Sebagai
Pemakalah

Seminar Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta
dengan Tema "Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan"
Yogyakarta, 21 - 22 Januari 2012

Ketua Umum PP ISPI,

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP 19500321 197412 1 001

Direktor UNY,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

PANITIA SEMINAR NASIONAL
ISPI Kerjasama dengan UNY
JANG

Prof. Soenarto, M.A., M.Sc., Ph.D.
NIP 19480804 187412 1 001